

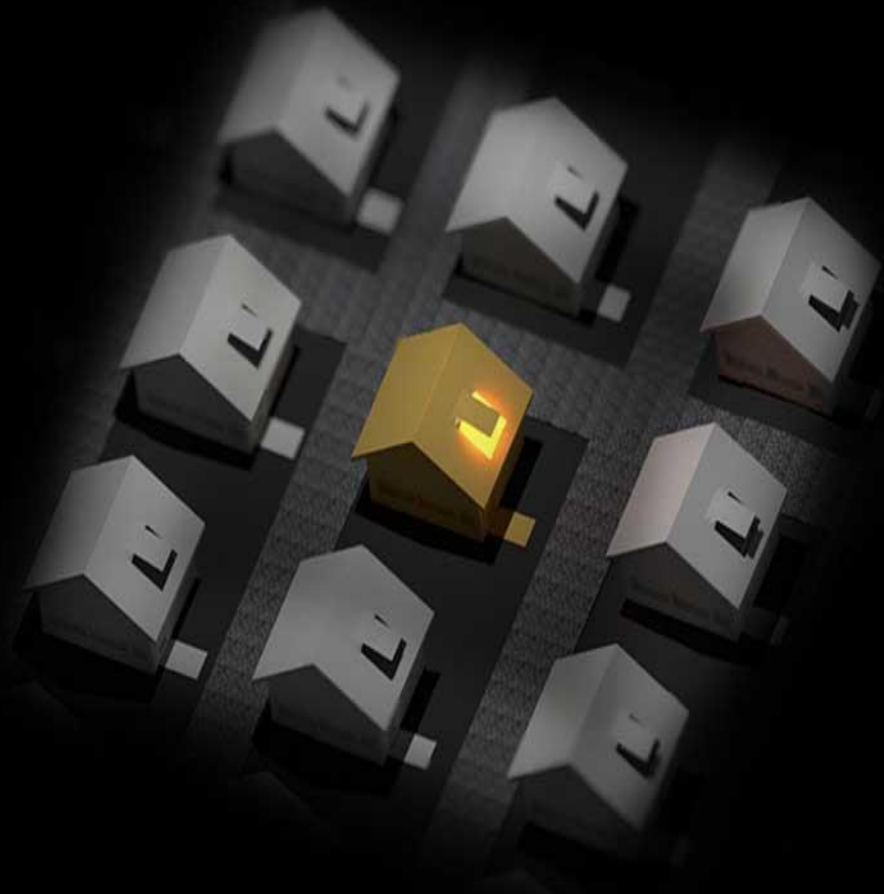


Dr. Fajar Laksono Suroso

Kabag. Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri
Mahkamah Konstitusi

MAHKAMAH KONSTITUSI DAN HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

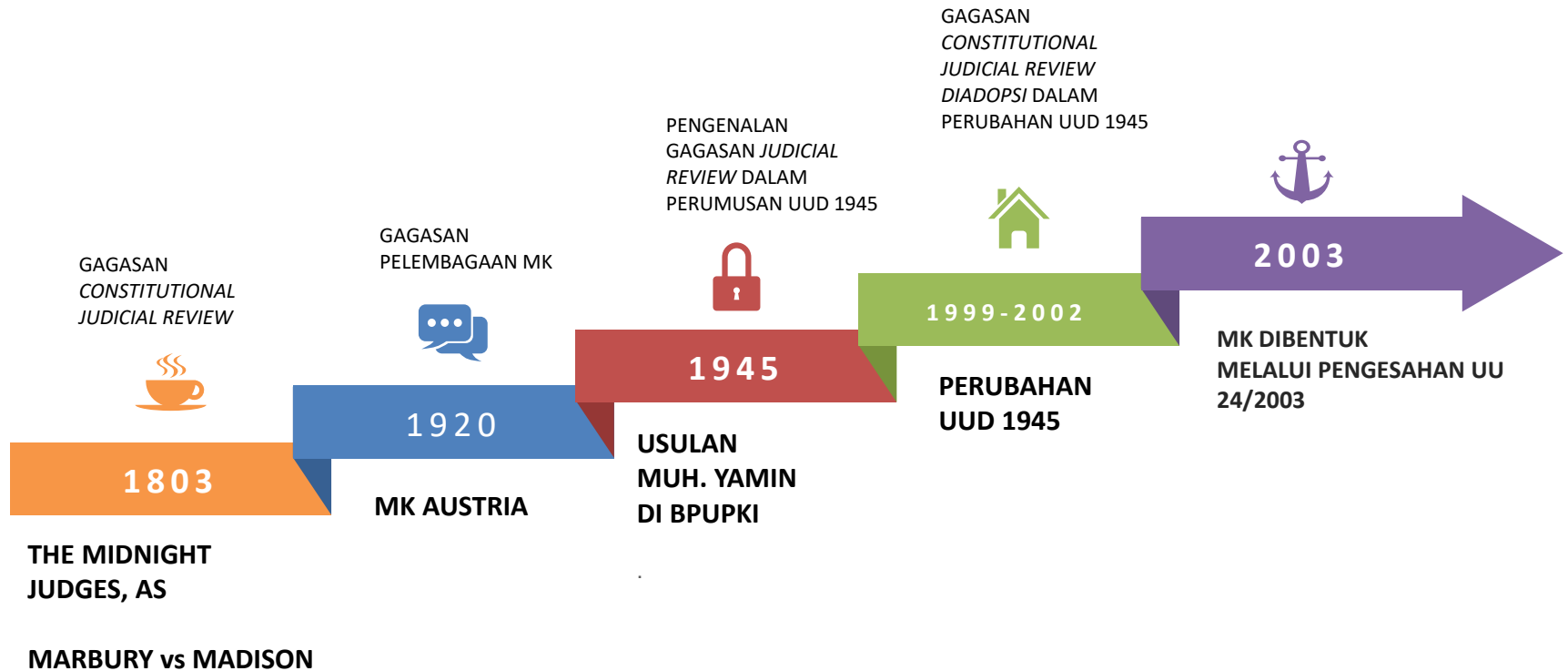
Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota PA GMNI
14 Juni 2022



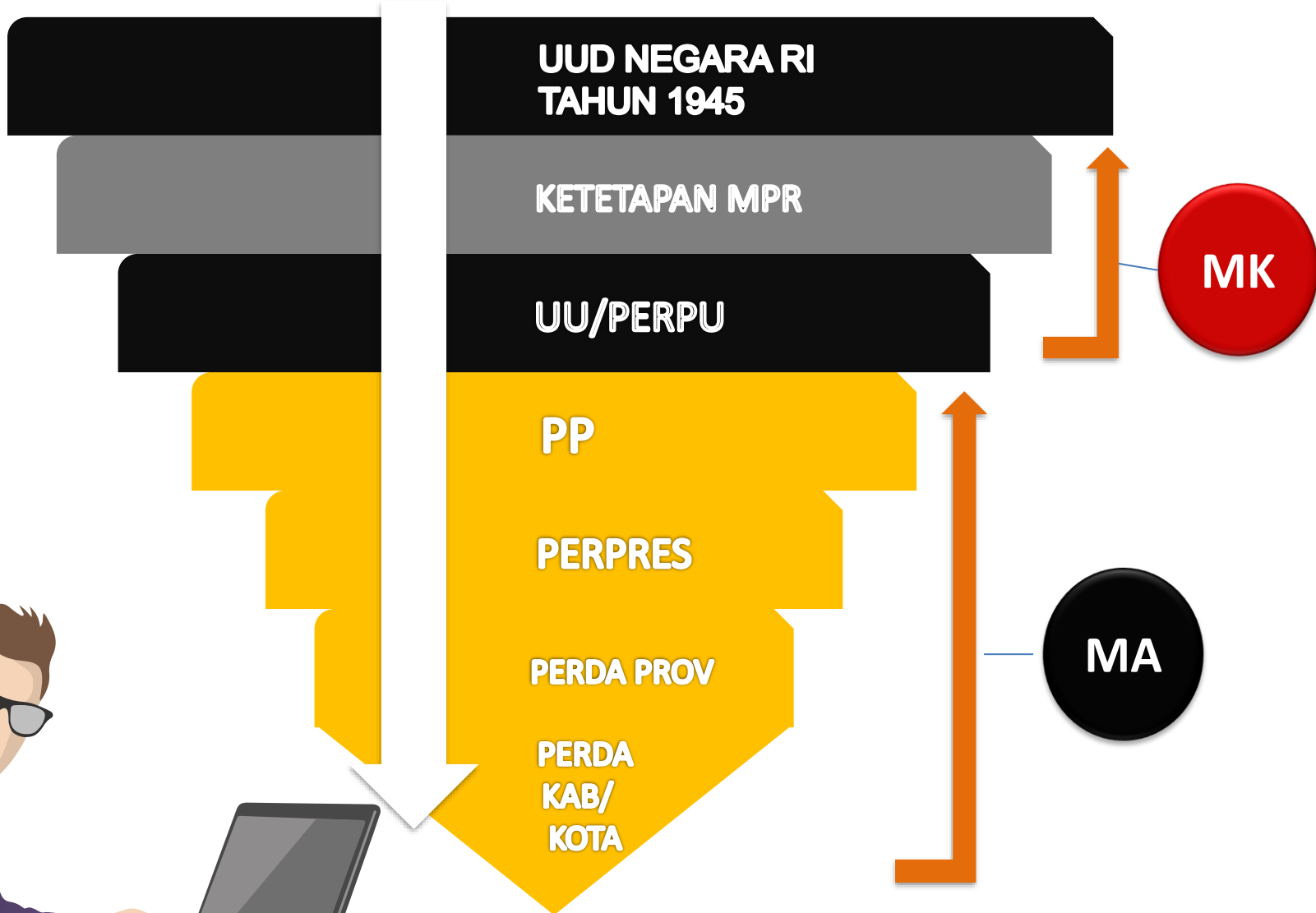
OUTLINE

- HISTORISITAS CJR DAN MK
- DUALISME *JUDICIAL REVIEW*
- KEWENANGAN MK
- KOMPOSISI HAKIM KONSTITUSI
- HUKUM ACARA: PENGAJUAN PERMOHONAN, PERSIDANGAN, PUTUSAN

HISTORISITAS CJR DAN MK



DUALISME *JUDICIAL REVIEW*



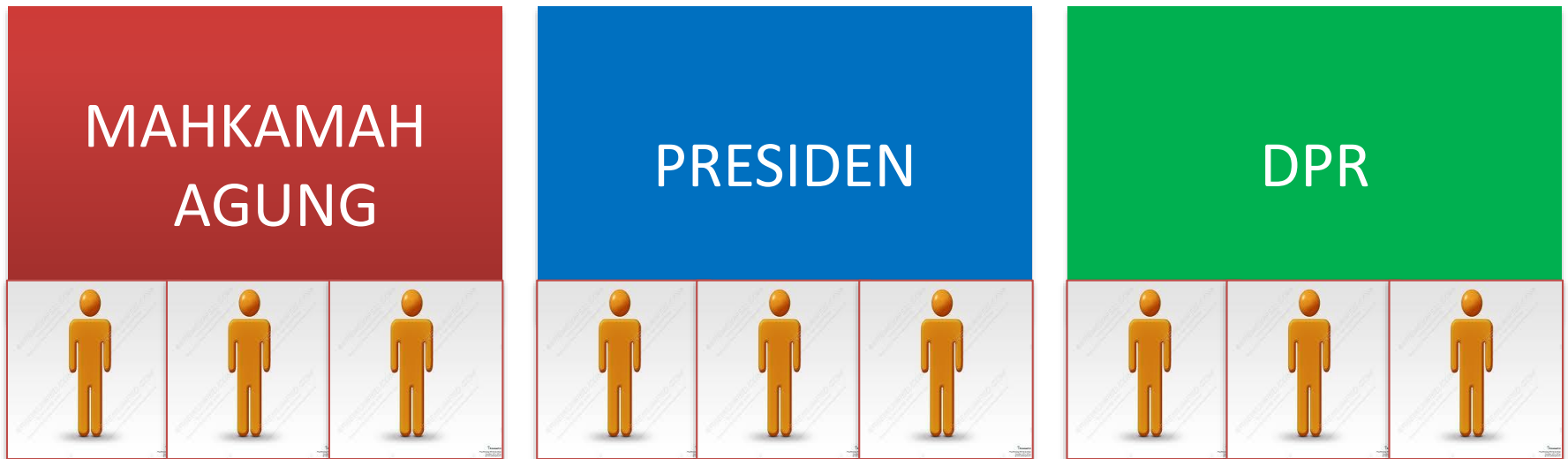
PASAL 7 UU 12/2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEWENANGAN MK

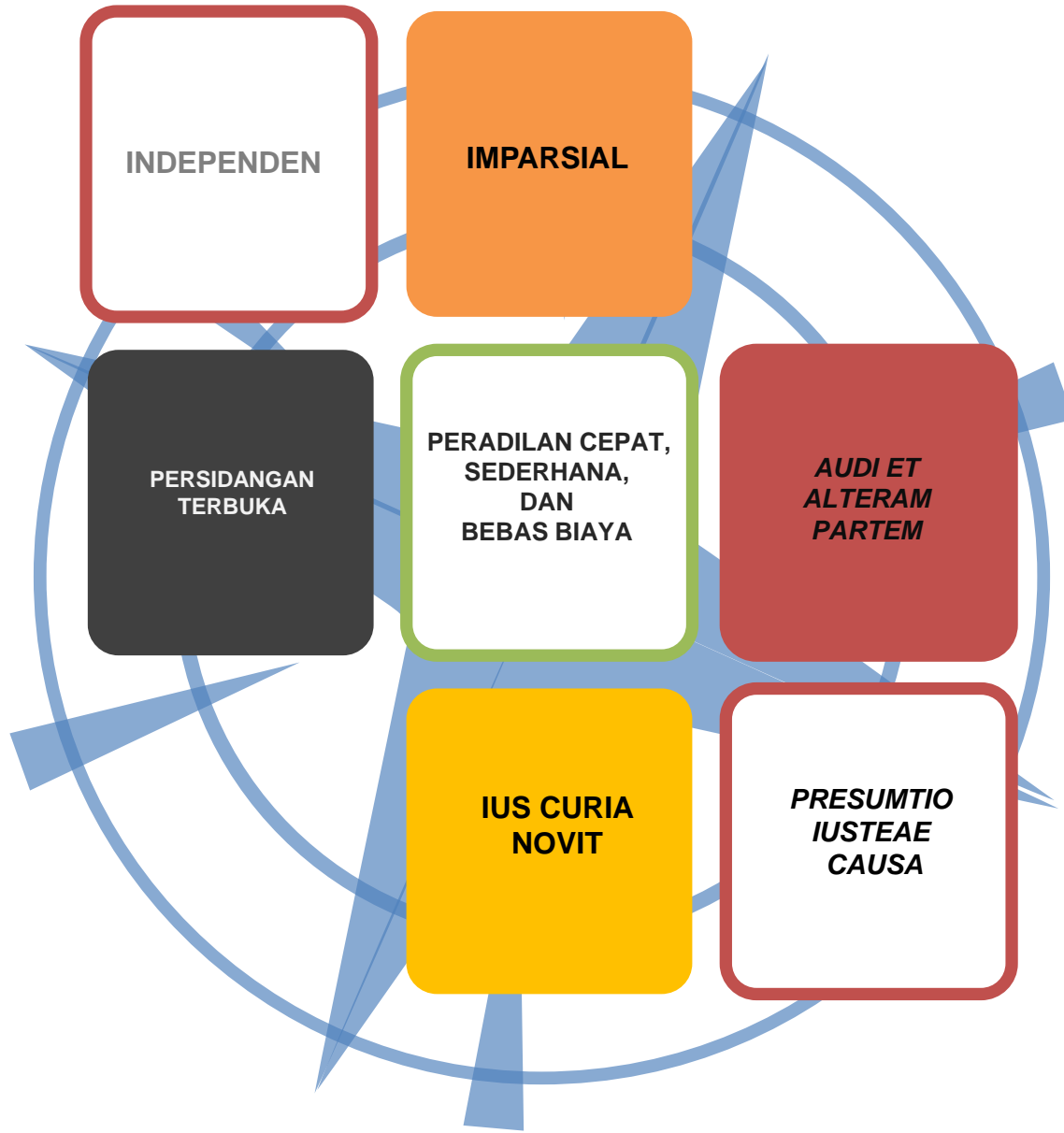


KOMPOSISI HAKIM KONSTITUSI

Pasal 24C Ayat (3) UUD 1945



ASAS-ASAS HUKUM ACARA MK



HUKUM ACARA PENGUJIAN UU

UU MAHKAMAH KONSTITUSI (UU 24/2003 jo UU 8/2011 jo UU 7/2020)

PASAL 28-49	: UMUM
PASAL 51-60	: PENGUJIAN UU TERHADAP UUD
PASAL 61-67	: SKLN
PASAL 68-73	: PEMBUBARAN PARTAI POLITIK
PASAL 74-79	: PHPU
PASAL 80-85	: PEMAHZULAN PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERSIDANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- | | |
|-------------------------------|--|
| • SIDANG YUDISIAL | : SIDANG PANEL, SIDANG PLENO |
| • RAPAT PERMUSYAWARATAN HAKIM | ; PEMBAHASAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN PERKARA |
| • SIDANG NON-YUDISIAL | : SIDANG PLENO KHUSUS PPENGUCAPAN SUMPAH KETUA/WAKIL KETUA MK,
SIDANG PLENO KHUSUS PENYAMPAIAN LAPORAN TAHUNAN MK |

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERSIDANGAN JARAK JAUH

SIDANG LURING, DARING, LURING-DARING

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

OBJEK PERMOHONAN (<i>OBJECTUM LITIS</i>)	: UU/PERPU
PARA PIHAK (<i>SUBJECTUM LITIS</i>)	: PEMOHON, PEMBERI KETERANGAN, PIHAK TERKAIT
PEMOHON	:

- perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama
- kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
- lembaga negara

13 TAHAPAN PENANGANAN PERKARA PENGUJIAN UU



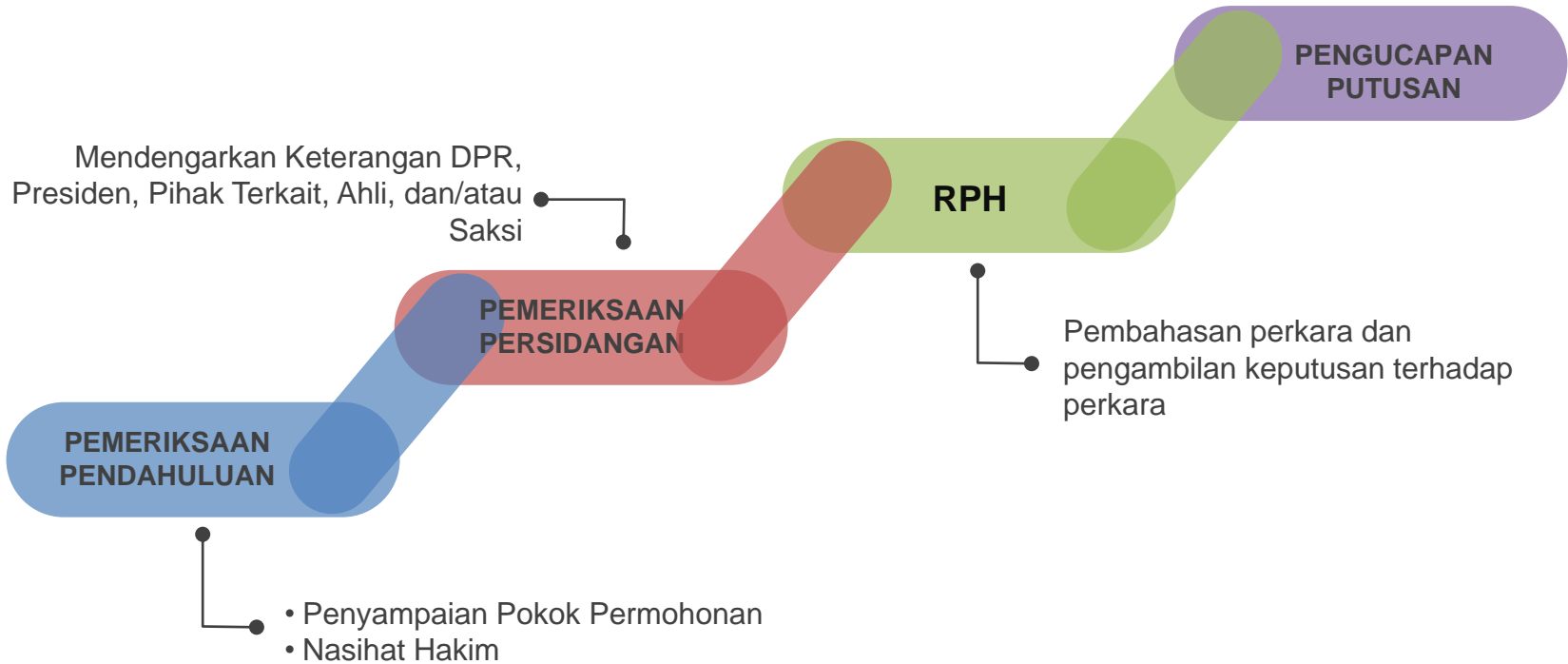
e-BP3
AP3
APKBP
DHPKP2

: BUKU PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHONON ELEKTRONIK
: AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHONAN
: AKTA PEMBERITAHUAN KEKURANGLINGKAPAN BERKAS PERMOHONAN
: DAFTAR HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN PERMOHONAN

AP4
e-BRPK
ARPK

: AKTA PEMBATALANPENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON
: BUKU REGISTRASI PERKARA KONSTITUSI
: AKTA REGISTRASI PERKARA KONSTITUSI

PERSIDANGAN



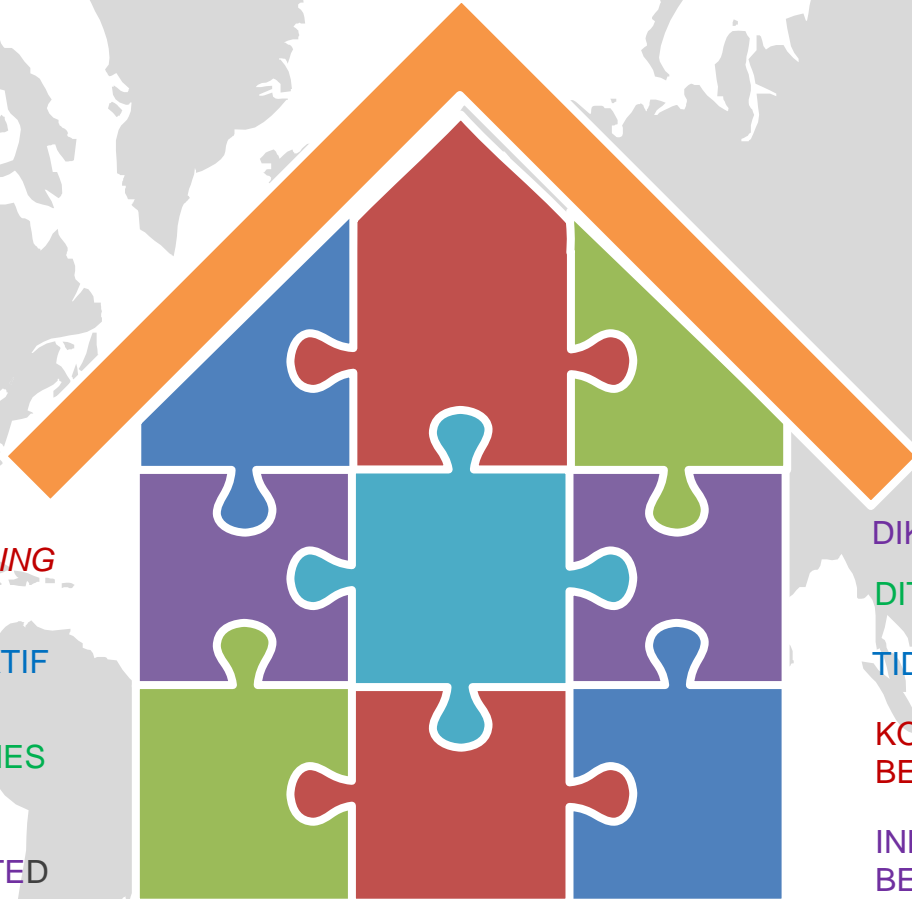
PUTUSAN

FINAL AND BINDING

PROSPEKTIF

ERGA OMNES

SELF IMPLEMENTED



DIKABULKAN

DITOLAK

TIDAK DAPAT DITERIMA

KONSTITUSIONAL
BERSYARAT

INKONSTITUSIONAL
BERSYARAT



TERIMA KASIH